



Ketahanan Keluarga Kunci Penyelesaian Problem Sosial

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif di Kota Yogya memilih upaya penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan problem sosial. Upaya tersebut, secara konkret direalisasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang konsisten diinisiasi DPRD Kota Yogyakarta beberapa periode terakhir.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Dhi-an Novitasari, mengatakan, bahwa ketahanan keluarga merupakan bagian dari indikator untuk kebaikan peradaban suatu kewilayahan maupun bangsa.

Oleh sebab itu, pihaknya pun memperjuangkan hal tersebut, lewat inisiasi Perda Kota Yogya No 8 Tahun 2020 tentang pembangunan ketahanan keluarga.

"Konsen kami saat mencetuskan Perda itu, karena memandang keluarga sebagai unit terkecil pendidikan anak," katanya, di sela agenda Dewan Menyapa, bersama Tribun Jogja, Senin (29/4).

Ia pun memaparkan, berbagai problem sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul karena faktor ketahanan keluarga yang cenderung rentan. Misalnya, kejahatan jalanan, atau akrab disebut klithih, yang beberapa tahun lalu sempat marak di Kota Yogya, hingga menjadi sorotan nasional.

"Kita mengetahui, dulu marak kejahatan jalanan di Kota Yogya, meski terjadi juga di daerah lain. Tapi, itu sumbernya dari ketahanan keluarga yang harus diperkuat," ujar Dhi-an.

Menurutnya, polemik tersebut tidak



TRIBUN JOGJA/AZKA
 RAMADHAN
DISKUSI - Diskusi bertajuk Dewan Menyapa yang membahas soal penguatan ketahanan keluarga di Kota Yogya, Senin (29/4).

bisa hanya dilimpahkan begitu saja kepada Pemkot Yogya, atau pemangku kewilayahan dan aparat penegak hukum. Sebab, untuk mengantisipasi kenakalan anak-anak usia remaja, dibutuhkan peran aktif dari keluarga, atau khususnya orang tua, dengan upaya pendampingan.

"Kejadian-kejadian di wilayah yang kita temui itu, anak-anak yang punya masalah itu berasal dari aspek keluarga yang tidak baik-baik saja," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya, Muhammad Ali Fahmi, menuturkan, Perda ketahanan keluarga di dalamnya mencakup banyak komponen. Yakni, terkait ketahanan dalam aspek ekonomi dan psikologis, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera dari sisi lahir maupun batinnya.

"Maka, kesehatan keluarga juga tercakup di Perda tersebut. Sehingga, isu stunting turut kami soroti guna

merealisasikan target zero stunting," ungkapnya.

Dijelaskan, prevalensi stunting di Kota Yogyakarta kini sudah menurun di angka 12,8 persen, atau jauh dari rata-rata nasional yang masih sebesar 17 persen. Capaian tersebut, tidak lepas dari upaya 'keroyokan' yang dilakukan seluruh stakeholder dalam penanganan stunting, termasuk aparat TNI dan Polri di wilayah.

"Untuk mewujudkan zero stunting memang tidak mudah. Tidak bisa hanya satu dinas, butuh kolaborasi. Semua harus bergerak," terangnya.

Politikus PAN itu menandakan, sebelum Perda No 8 Tahun 2020, pihaknya sudah lebih dahulu menginisiasi Perda No 1 Tahun 2016 tentang kota layak anak. Melalui payung hukum tersebut, legislatif berkeinginan memunculkan rasa *enjoy* untuk anak-anak, ketika beraktivitas di lingkup keluarga dan lingkungan masyarakat atau ruang publik. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005